

INTEGRASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA YANG BERBASIS PADA LINGKUNGAN SEKOLAH

M. ABDUL ROZIQ A.^{*)}

**)Dosen STKIP PGRI Tulungagung
e-mail: asroriroziq@gmail.com*

ABSTRAK

Dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa positif dan negatif, dampak negatif adalah adanya hidup dan kehidupan perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma agama, hukum, moral dan kesusilaan. Dalam konteks negara bangsa dan hegemoni kekuasaan negara akan sulit untuk berubah, tetapi dapat terjadi karena efek dari polarisasi di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya yang di seluruh dunia. Untuk visi masa depan bangsa yang berdaulat dan misi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga arah pembangunan, khususnya generasi muda lebih efektif dan arah yang jelas. Sebagai visi pembangunan nasional dari 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pada dasarnya, education adalah proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia di holisitk, dengan kemampuan untuk develop afektif, kognitif, dan psikomotorik secara optimal. Pembangunan pendidikan nasional di sinergi dan linearitas diarahkan membangun, memelihara, mengembangkan karakter dan wawasan kebangsaan, persatuan nasional, solidaritas nasional, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan karakter adalah usaha sadar untuk mendidik peserta didik untuk membuat keputusan by self dan memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Dalam pendidikan karakter ditentukan oleh tiga hal: mengetahui, perasaan moral yang moral, dan perilaku moral. Dengan tujuan untuk membangun bangsa yang kuat, kompetitif, moral, berbudi, akhlak mulia baik, toleransi, bekerja sama, semangat patriotik, berkembang dinamis, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Melalui acculturation dan pendidikan pemberdayaan karakter bangsa dapat ditanamkan, disosialisasikan, ke dalam jiwa dan kepribadian siswa sehingga mereka dapat menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dengan menekankan pendidikan sekolah, budaya dan komunitas masyarakat dengan kognitif, afektif, psikomotor, sosial.

Kata Kunci: *Nilai-nilai Pancasila, Pendidikan Karakter, Budaya*

A. PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi dunia telah memberikan warna tertentu dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dipandang sebagai pembangunan bangsa membagi ke dalam bagian tertentu dengan penggunaan teknologi tingkat tinggi. Kemajuan teknologi tidak

bisa dihindari dalam budaya dan peradaban manusia. Dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa positif dan negatif, dampak negatif adalah adanya hidup dan kehidupan perilaku manusia yang menyimpang dari nilai-nilai, norma-norma, dan moral. Video merajalela porno di masyarakat,



aksi teror, geng motor, perkelahian antara siswa, dan siswa di berbagai tempat, obat penyalahgunaan, jumlah kasus hukum dalam bingkai mafia hukum, Keragu-raguan pemerintah dalam sikap terhadap masalah bangsa, banyak anggota Dewan yang tidak disiplin dalam etos kerja, dll. Realitas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan negara dalam semua aspek kehidupan. Hal ini dianggap perlu untuk memiliki perbaikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama di sistem pendidikan nasional. Paradigma pembangunan bangsa itu diarahkan dan terfokus pada pendidikan sebagai ujung tombak pembangunan bangsa, dalam upaya untuk menghilangkan dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat karakter pendidikan dan nilai-nilai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dengan pendekatan multidisiplin dan interdisipliner.

Perubahan dalam semua aspek kehidupan harus disertai dengan visi, misi, dan konsep kehidupan ke masa depan, peran saat ini perubahan yang dibawa oleh globalisasi dunia saat ini, menunjukkan bahwa batas-batas antar negara semakin *virtual*. Dalam konteks negara bangsa dan hegemoni kekuasaan negara akan sulit untuk berubah, tetapi dapat terjadi karena efek dari polarisasi di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya yang di seluruh dunia. Untuk visi ke depan bangsa yang berdaulat dan misi harus dirumuskan sedemikian rupa

sehingga arah pembangunan, khususnya generasi muda lebih efektif dan arah yang jelas. Sebagai visi pembangunan nasional dari 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. (UU No. 17 tahun 2007). Sedangkan misi pembangunan nasional (1) menciptakan masyarakat yang memiliki moral yang tinggi, etika, budaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) mewujudkan bangsa Indonesia yang kompetitif; (3) menciptakan masyarakat demokratis berdasarkan hukum; (4) membuat Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) menciptakan pembangunan yang sama dan merata; (6) menciptakan Indonesia yang indah dan berkelanjutan; (7) membuat Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat.

Dalam upaya untuk membangun bangsa dan karakter, warga negara yang baik, konsep nasionalisme, dan identitas nasional, nilai-nilai pendidikan harus dilihat sebagai bagian sentral dalam pendidikan strategis dan nasional. Sekolah sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis melalui pendidikan dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan karakter berdasarkan Pancasila. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20. Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dalam Pasal 3 UU No. 20/2003 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan karakter perkembangan dan peradaban martabat



dalam konteks kehidupan intelektual bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. (UU No. 20/2003).

Dengan melihat isi dari artikel ini, dapat dikatakan bangsa dan pembangunan karakter masih diperlukan dalam menghadapi kehidupan yang semakin global dan adanya benturan semakin tajam masalah *civilizations*, yang ada adalah bagaimana integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter bangsa dan sekolah berbasis budaya masyarakat? Adalah konsep pembangunan bangsa secara eksplisit menekankan perlu ada pendidikan karakter nasional? Bagaimana konsep pendidikan karakter nasional dapat mengatasi dampak negatif dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi? Apa yang perlu dari pengembangan pendidikan karakter dengan desain internal berbasis kelas, sekolah berbasis budaya, dan sekolah berbasis masyarakat?

B. PEMBAHASAN

Nilai-nilai Pancasila Sumber dari Karakter Bangsa, Budaya dan Pendidikan Sekolah.

1. Pancasila sebagai sumber Pendidikan Karakter

Dalam kehidupan Indonesia Pancasila merupakan dasar filosofis bangsa Indonesia. Dalam posisi ini, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia. Implementasi adalah Pancasila merupakan sistem nilai yang mencakup nilai-nilai: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan. Dalam proses pembangunan bangsa saat ini, nilai-nilai keseluruhan Pancasila tanpa makna. Hal ini disebabkan kebebasan yang berlebihan setelah keberhasilan reformasi tanpa perubahan yang signifikan spiritual dan material, yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan tujuan pembangunan bangsa memiliki tanpa tujuan. Dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang diduga adanya masalah yang sangat kompleks. Masalah yang berhubungan dengan hilangnya disintegrasi sosial masyarakat insting luas: dari *komunal* kerugian atau hilangnya kepatuhan *obligasi solidaritas* untuk sistem sosial dan norma-norma. Dari uraian di atas masalah dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) kondisi sosial yang menggambarkan isu-isu penting yang harus diatasi seperti tingkat kebodohan, kemiskinan dan pengangguran; (2) kondisi sosial juga ditandai dengan penyimpangan bentuk yang mengganggu kepentingan umum, seperti kejahatan, penyalahgunaan narkoba, penyimpangan seksual. Keadaan seperti pelanggaran nilai-nilai, norma dan moral;



(3) Masalah dari disorganisasi yang menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan dan *komunal* akan nilai sesuatu. *Vandalisme* fasilitas umum telah mewabah di mana-mana tanpa konsekuensi. Masalah dehumanisasi manusia telah meluas bahwa nilai-nilai kemanusiaan tidak lagi dipertimbangkan; (4) Masalah disfungsi sosial yang menunjukkan tidak berfungsinya lembaga sosial dan jaringan sosial yang luas. Masalah yang sangat aktual dan faktual bangsa mendera Indonesia hari ini meliputi: (1) adanya disorientasi dan tidak dihayatinya nilai-nilai Pancasila; (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; (3) pergeseran nilai etika dalam kehidupan bangsa; (4) kesadaran memudarnya nilai-nilai budaya bangsa; (5) ancaman disintegrasi bangsa; (6) melemahnya nasionalisme.

Kita patut bersyukur, jika sekarang adalah kerinduan untuk nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar, panduan dari bangsa tampak menguat kembali. Hal ini ditunjukkan oleh pembahasan semakin luas dari Pancasila di berbagai forum sejak tahun 2005. Bahkan dalam peringatan enam puluh satu tahun kelahiran Pancasila pada 1 Juni 2006 di pidato politik Jakarta Convention Center (JCC) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tema "*Restrukturisasi Kerangka Hidup berdasarkan Pancasila*". Mantan Presiden mengajak orang untuk menjawab pertanyaan mendasar "*Mengapa kita harus kembali ke berbicara*

Pancasila?". Penegasan ini mengajak bangsa Indonesia untuk menempatkan Pancasila dalam konteks makna sebenarnya dari reformasi yang kita lakukan hari ini.

Jika kita memahami, menghargai, dan mempraktekan nilai-nilai Pancasila jujur dan benar dan konsisten oleh setiap anggota masyarakat dan komponen bangsa, penyelenggara negara dan elit politik dalam melaksanakan gerakan reformasi untuk menciptakan masa depan Indonesia yang dicita-citakan, Pancasila dapat menjadi perekat dan mengarahkan kekuatan keanekaragaman nasional dalam rangka mewujudkan negara dan bangsa pada kesejahteraan. Selain itu, secara filosofis Pancasila dapat dikembangkan menjadi sistem nilai, norma dan moral yang bersifat universal, yang terletak di dalam prinsip pertama Allah SWT, sebagai sumber nilai tertinggi dari primer dan sila lainnya, dan kemudian berakhir dengan prinsip Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kesejahteraan rakyat. Pancasila tidak diragukan lagi dasar filosofis untuk Indonesia.

Pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai budaya bangsa, tetapi juga sumber hukum dasar nasional, dan merupakan perwujudan dari cita-cita mulia dalam semua aspek kehidupan nasional. Nilai Pancasila adalah sebuah Implementasi yang harus diterjemahkan ke dalam norma moral, pengembangan norma, aturan hukum, dan kehidupan etis bangsa. Dapat disimpulkan bahwa

bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar filosofis yang kuat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Masalahnya adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila menjadi bagian dan mengintegrasikan, tertanam dalam jiwa dan tubuh bangsa Indonesia dalam hal sifat manusia Indonesia ke dalam kehidupan nyata setiap individu warga negara.

2. Karakter Bangsa, Budaya, dan Sekolah sebagai Visi dan Misi Pendidikan.

Visi pembangunan Indonesia dalam RPJP tahun 2005 - 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. (1) Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sama dengan negara lain untuk mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, (2) Kualitas sumber daya manusia, tingkat kesejahteraan, dan stabilitas sistem dan lembaga-lembaga politik dan hukum, (3) Adil, berarti pasang surut tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antara individu, jenis kelamin, dan daerah, (4) Sejahtera, artinya diukur dari tingkat kepatuhan dengan semua kebutuhan hidup. Dalam pelaksanaannya dijelaskan misi pembangunan: (1) menciptakan masyarakat yang memiliki moral yang tinggi, etika, budaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) mewujudkan bangsa Indonesia yang kompetitif; (3) menciptakan masyarakat demokratis berdasarkan hukum; (4) membuat Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) Menciptakan pembangunan yang sama dan merata; (6) menciptakan

Indonesia yang indah dan berkelanjutan; (7) membuat Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, maju, kuat, dan berkepentingan.

Dengan memperhatikan visi, dan misi pembangunan dianggap sangat *urgen* dalam membangun pendidikan karakter (*character building*). Dalam evolusi sistem pendidikan nasional merencanakan pembentukan pendidikan sebagai lembaga yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan menjadi jawaban proaktif tantangan perubahan zaman. Dengan visi ini akan terwujud dan Kompetitif mencerdaskan Indonesia, yang dimaksudkan adalah bahwa makhluk cerdas secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosi, cerdas sosial, intelektual cerdas, cerdas dan kinestetik. Makhluk cerdas bingkai komprehensif dan kompetitif dalam: (1) afektif tercermin dalam kualitas iman, pengabdian, aklaq mulia, kepribadian unggul dan kompetensi estetika; (2) kognitif yang tercermin pada kekuatan pikiran dan kapasitas intelektual untuk menggali dan mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, keterampilan praktis, dan kedutan kompetensi. (Depdiknas, 2007: 9-11). Pada dasarnya, pendidikan adalah proses sistematis untuk me-



tingkatkan martabat manusia di holisitk, dengan kemampuan untuk mengembangkan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pembangunan pendidikan nasional secara *sinergis* dan *linearitas* diarahkan membangun, memelihara, mengembangkan karakter dan wawasan kebangsaan, persatuan nasional, solidaritas nasional, persatuan dan kesatuan bagi siswa dalam hal mewujudkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keragaman bangsa Indonesia sebagai pilar kebangsaan. Budaya Pendidikan Karakter Nasional adalah membangun manusia Indonesia dengan membangun komunitas karakter dan memiliki pemikiran yang positif sejak usia dini. Pendidikan karakter akan lebih cepat didukung oleh pemerintah dan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Menurut Conny Semiawan R, dimasukkannya karakter dari kurikulum sekolah akan mempercepat penyebaran pendidikan karakter. Termasuk penjangkauan untuk orang tua dan generasi muda karena pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga rumah dan sekitarnya. (Media Indonesia, 3 Oktober 2015). Pengembangan karakter bangsa adalah upaya kolektif dari sistemik negara-bangsa untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, kebijakan negara, serta potensi kolektif dalam konteks ke-

hidupan nasional, regional, global dan beradab. Dengan tujuan untuk membangun bangsa yang kuat, kompetitif, mulia, berbudi, akhlak mulia berakhlak, bertoleran, bekerja sama, semangat patriotik, berkembang dinamis, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila (Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa, 2010: 7).

Menurut ALPTKI (2009: 3-8) pendidikan karakter sebagai bagian dari pendidikan nasional berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Karakter adalah keunikan yang melekat pada individu, kelompok, masyarakat atau bangsa. Karakter nasional diwujudkan dalam rasa nasionalisme yang kuat, berdasarkan nilai-nilai inti yang universal dalam konteks yang beragam.
- b. Pendidikan karakter adalah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir selama sebagai bangsa dan negara di sana dan ingin terus eksis. Pendidikan karakter harus tetap merupakan bagian integral dari pendidikan selama beberapa generasi.
- c. Dalam Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20. Tahun 2003 sebagai dasar hukum formal perlunya untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan.
- d. Proses pembelajaran sebagai wahana pendidikan dan pengembangan karakter tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kemampuan ilmu pe-

ngetahuan, teknologi, dan seni sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU No.20 tahun 2003.

- e. Proses belajar sebagai sarana untuk mendidik pendidikan karakter, harus dibangun atas makna yang terkandung dalam pasal dan ayat dari UU No. 20 tahun 2003 telah disebutkan di atas, dan telah secara konsisten menjadi landasan kebijakan pendidikan nasional.
- f. Proses ini akan melibatkan aspek pendidikan karakter dari perkembangan peserta didik, baik kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik secara keseluruhan (holistik) dalam kehidupan budaya.
- g. Sekolah sebagai sarana peserta didik dan guru sebagai fasilitator adalah elemen yang tidak terpisahkan dari peraturan, kebijakan, dan birokrasi.
- h. Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk kehidupan, sebagai proses pengembangan ke arah manusia yang utuh. Oleh karena itu pendidikan karakter memerlukan teladan dan sentuhan mulai awal masa hingga dewasa.

Pendidikan karakter menjadi bertingkat, *multichannel*, dan *multisetting* karena hanya dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Pembentukan karakter perlu teladan, perilaku nyata dalam kehidupan *otentik* dan lingkungan tidak dapat dibangun dalam sekejap. Pendidikan karakter adalah usaha sadar untuk mendidik peserta didik untuk membuat keputusan bijaksana dan memperhatikan

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Pendidikan karakter merupakan upaya untuk mencegah pertumbuhan sifat-sifat buruk yang dapat menutupi sifat manusia, serta kereta anaka untuk terus melakukan perbuatan baik sehingga tertanam dalam dirinya yang akan tercermin dalam tindakan yang selalu berbuat baik. (Ratna Megawangi, 2004: vii).

Lickona (1992) berpendapat bahwa ada 11 faktor yang dapat menentukan keberhasilan pendidikan karakter di satuan pendidikan, yaitu: (1) pendidikan karakter harus mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk karakter yang baik; (2) karakter harus didefinisikan secara keseluruhan yang mencakup aspek pemikiran, perasaan, dan tindakan; (3) pendidikan karakter yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan fokus pada guru sebagai model peran; (4) Sekolah harus menjadi model masyarakat yang damai dan harmonis; (5) Sekolah harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih perilaku moral; (6) pendidikan karakter yang efektif harus mencakup materi kurikulum yang berarti bagi kehidupan anak-anak, atau berbasis kompetensi; (7) pendidikan karakter harus meningkatkan motivasi internal anak; (8) seluruh staf sekolah harus terlibat dalam pendidikan karakter; (9) pendidikan karakter di sekolah membutuhkan kepemimpinan moral dari berbagai pihak, pemimpin, staf dan guru; (10) sekolah harus bekerja

sama dengan orang tua dan masyarakat sekitar; (11) harus menjadi evaluasi berkala dari keberhasilan pendidikan karakter di sekolah.

Karakteristik pendidikan karakter sebagai model dasar pembangunan masa depan mencakup: (1) kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota dari komunitas global; (2) kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dengan cara kooperatif dan menerima tanggung jawab untuk peran atau tugas di masyarakat; (3) Kemampuan untuk memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan budaya; (4) kemampuan untuk berpikir secara kritis dan sistematis; (5) keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara non-kekerasan; (6) keinginan untuk mengubah gaya hidup mereka dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan; (7) kemampuan untuk menjadi sensitif dan melindungi hak asasi manusia; dan (8) keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Peradaban Indonesia akan hancur dalam kasus demoralisasi di masyarakat. Faktor Moral adalah modal utama yang harus menjadi dasar dari membangun masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera, karena pada dasarnya berakar pada agama, Pancasila, dan Sosial Budaya bangsa Indonesia.

Sementara Mochtar Lubis dikutip Aswandi (2010, 17) menyatakan sifat karakter manusia meliputi: (1) munafik

atau lain di mulut lain di hati; (2) enggan bertanggung jawab; (3) memotong mental, ingin kaya tanpa usaha, ingin pintar tanpa belajar; (4) feodal; (5) masih percaya takhayul di; (6) penampilan /style; (7) karakter lemah sehingga dengan mudah mengubah keyakinannya demi kelangsungan hidup; (8) *happy nostalgia* / efouria masa lalu; (9) cepat marah; (10) pembangun untuk ditukar dengan lainnya asal dapat uang tunai.

Pendidikan karakter harus dilaksanakan melalui tingkat konseptual, kelembagaan, operasional, dan pendidikan desain, kelas berdasarkan Budaya Sekolah, dan berbasis masyarakat Dalam membangun pendidikan karakter bangsa, pendekatan *multi approach* holistik meliputi: (1) harmoni sosial yang kuat, membangun bangsa bersatu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur yang diperlukan untuk keharmonisan kehidupan sosial, (2) stabilitas nasional dan dukungan mantap dinamis pembangunan nasional, (3) Demokrasi dan masyarakat sipil, (4) Undang-Undang dan ketertiban konsisten dan adil, (5) pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ditopang oleh kapasitas nasional untuk mengatur kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan lebih mandiri, (6) Tata pemerintahan yang baik, (10) Perlindungan lingkungan, (11) pembangunan daerah Intensif, (12) *patnership global*.

Sementara modal pendidikan karakter bangsa pada kebijaksanaan Departemen Pendidikan dan kebudayaan meliputi: agama, jujur, toleransi, disiplin,



kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, semangat nasional, cinta negara, menghormati prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, sosial, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya harus didukung oleh faktor-faktor: kepemimpinan, sinergi positif, *participation publik*, integritas dan profesionalisme, lingkungan yang kondusif, dan nasionalisme dan pembentukan karakter. Pendekatan dalam membangun pendidikan karakter bangsa adalah metode nasionalisme kecerdasan emosional. Metode ini meliputi: pendidikan, rekreasi, reflektif, futuristik, aplikatif, fungsional, penguatan. Dalam mewujudkan pendidikan karakter bangsa saat ini, dapat melalui pendidikan formal dalam bentuk: pendidikan karakter sebagai subyek yang terpisah, pengelompokan pendidikan karakter dalam mater subjek, pendidikan karakter ditetapkan sebagai subyek yang diperlukan dan harus, pendidikan karakter adalah proses pendidikan itu sendiri (Doni Koesoema A, 2012: 7-9).

Mengintegrasikan nilai Pancasila dalam karakter pendidikan dan sekolah masyarakat berbasis budaya dapat mengasumsikan pendekatan fenomenologis. Dalam konteks ini pelajar sebagai wadah dengan segala potensinya, dan perlu diberikan sebagai isi materi. Dalam kebebasan, baik peserta didik formal, informal, dan non memiliki kecenderungan untuk mengisi wadah dengan hal-hal negatif. Dalam proses ini

peserta didik tentu telah terkontaminasi oleh hal-hal negatif. Agar peserta didik tidak gagal untuk hidup, perlu menjadi *katalis* dalam bentuk nilai-nilai, norma, dan moral yang datang ke agama, Pancasila, dan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Dengan adanya katalis peserta didik tersebut akan menjadi *Civic Literacy* ditandai dengan *respect* dan tanggung jawab.

C. KESIMPULAN

Dampak sebenarnya dari globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan memiliki dampak negatif dan positif. Dalam menghilangkan kebutuhan untuk menempatkan dampak pendidikan karakter di posisi terdepan. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter berbasis budaya dan komunitas sekolah dalam subjek atau mata pelajaran pengembangan kepribadian dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. Berdasarkan hal diatas kita dapat menyimpulkan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter berbasis budaya dan masyarakat sekolah harus ditandai dengan:

1. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber nilai berbasis karakter nasional pendidikan lingkungan budaya sekolah, keluarga, lingkungan masyarakat setempat yang dikembangkan sesuai dengan budaya nasional dengan memperhatikan pengetahuan lokal

sehingga mudah dipahami, dihayati dan dipraktekkan.

2. Pendidikan karakter harus dikembangkan melalui budaya berbasis desain dan komunitas sekolah serta terintegrasi dengan kemampuan warga untuk domain kognitif, afektif, psikomotor, dan sosial.
3. Pendidikan tidak akan efektif dan efisien jika pendidikan dilaksanakan sempit untuk meninggalkan elemen pembudayaan dan pemberdayaan dalam konteks pendidikan nasional. Dalam hal ini antara pendidikan dan akulturasi dan pemberdayaan adalah kesatuan yang utuh dan pendidikan karakter ditentukan oleh tiga hal: mengetahui, perasaan moral yang moral, dan perilaku moral.
4. Budaya lingkungan dan komunitas sekolah, keluarga adalah media yang paling efektif dalam pendidikan karakter pendidikan bangsa.
5. Program dan ekstra kurikuler harus integrasi dengan nilai Pancasila dalam karakter pendidikan dan komunitas sekolah berbasis budaya bangsa.
6. Menanamkan konsep dasar Pancasila menjadi pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan ber-Bhinneka Tunggal setiap jenis, jalur, dan pendidikan baik dalam formal, informal dan non-formal.
7. Memosisikan kembali pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, dan identitas nasional sebagai kontrak politik untuk bangsa

Indonesia merdeka, progresif, adil, dan makmur.

8. Melaksanakan pendidikan karakter nasional yang tersirat dalam pendidikan kewarganegaraan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas dari mata pelajaran atau mata kuliah PKN tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama dari semua subyek pendidikan nasional.
9. Pendekatan yang dikembangkan adalah pendekatan *multisdipliner* dan *multidimensi* yang *holistik* sehingga dapat dikembangkan menjadi bangsa yang mempunyai sikap mental yang kuat.

D. DAFTAR PUSTAKA

-, (2010), *Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 - 2025*. Jakarta : Pemerintah RI
-(2003) *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*, Jakarta : Depdiknas
-(2007) *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025* , Bandung : Fokus Media
-(2006) *Pedoman Pengembangan Silabus dan Model Pembelajaran*, Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikdasmen
- Ashhiddiqie, Jimly, (2010), *Wawasan Kebangsaan dan Rule of Law : Kondisi dan Solusi Produktif Memperkuat Integrasi Bangsa (makalah)*. Jakarta : 1 Juni 2010
- Basyar, Hamdan dan Tobing, Fredy BL., (2009), *Kepemimpinan Nasional Demokrasi, dan Tantangan*



- Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Budimansyah, Dasim dan Syam, Syaifullah (ed) (2006) *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan, menyambut 70 tahun Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS-UPI.
- Hamengku Buwono X, Sultan, (2007), *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama
- Huntington, Samuel P., (2002), *Benturan antar Peradaban*. Yogyakarta : Qalam
- Husaini, Adian, (2005), *Wajah Peradaban Barat*. Jakarta : Gema Insani
- Iksan, A. Bakir, (2009), *Etika dan Logika Berpolitik Wacana Kritis atas Etika Politik, Kekuasaan dan Demokrasi*. Bandung :Pt. Remaja Rosdakarya
- Kartodirdjo, Sartono (1994) *Kebudayaan pembangunan dalam perspektif sejarah*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Koentjaraningrat (1982) *Masalah-masalah pembangunan (Bunga rampai antropologi terapan)*, Jakarta : LP3ES
- Koesoema A, Doni, (2012). *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta : Kanisius
- Lickona, T. (1992). *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York : Bantam Books
- Megawangi, Ratna, (2004), *Pendidikan Karakter : solusi yang tepat untuk membangun bangsa*. Jakarta : BP Migas
- Oommen, T.K., (2009), *Citizenship, Nationality and ethnicity Reconciling Competing Identities* diterjemahkan oleh Munabari Fahlesa
- Kewarganegaraan, Kebangsaan, dan etnisitas mendamaikan Persaingan Identitas*. Bantul : Kreasi Wacana.
- Ruyadi, Yadi, (2010), *Model Pendidikan Budi Pekerti Berbasis Tradisi : Upaya Mengokohkan Karakter Bangsa Berjati Diri Indonesia*. Bandung : UPI
- Sapriya, Ed. , (2012). *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan Dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan : Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Laboratorium PKn UPI
- Syam, Firdaus (2009), *Membangun Peradaban Indonesia*. Jakarta : Gema Insani
- Tilaar, H.A.R, (2007), *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ubaedillah, A. et. al. (2009) *Pendidikan kewarganegaraan (Civic education) demokrasi hak-hak asasi manusia dan masyarakat madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Prenada Media Group
- Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah (2007) *Civic education : konteks, landasan, bahan ajar dan kultur kelas*, Bandung : Prodi PKn SPS UPI
- Verdiansyah, Chris (ed), (2007), *Membongkar Budaya Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara